



PERANCANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS UNTUK PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

APPLICATION DESIGN OF TASK UNIT ACTIVITY MANAGEMENT FOR WOMEN AND CHILD PROBLEMS MANAGEMENT

Agus Qomaruddin Munir^{1*}, Zaidir², Bagus Subekti Nuswantoro³, Yusriadi⁴

^{1,2,4}Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Respati Yogyakarta

³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta

^{1*} agusqmnr@respati.com, ² zaidirtan@gmail.com, ³ bagus.subekti07@yahoo.com,

⁴ Yusri.stbk@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Tindak kekerasan pada perempuan dan anak ditinjau dari perspektif individual maupun social dapat mengakibatkan efek ganda. Pertama efek psikologis dan kedua adalah efek kesehatan individu serta kualitas kesehatan masyarakat. Dusun Katekan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah merupakan wilayah pedesaan yang aktif dalam kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Keterlibatan pemerintah desa menjadi penting untuk jalannya program pencegahan, karena secara terstruktur kegiatan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) meliputi: penjangkauan, identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan, perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian (pertolongan darurat), penempatan dan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan rekomendasi. Proses pengelolaan kegiatan PPA di lingkungan pemerintah desa dilakukan secara konvensional yaitu dengan melakukan pencatatan pada kertas kerja. Sebagai bentuk dalam upaya memajukan teknologi informasi di wilayah desa Katekan maka perlu adanya inovasi dari pengelolaan kegiatan Satgas PPA. Tujuan pengabdian ini dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu adalah 1) Pembuatan sistem informasi dan 2) Melakukan sosialisasi aplikasi pengelolaan kegiatan satuan tugas untuk penanganan masalah perempuan dan anak bagi kelompok kerja yang ada di desa Katekan Gantiwarno Klaten, Jawa tengah. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan dalam bentuk implementasi penggunaan aplikasi secara *online*.

Kata kunci: Perlindungan Perempuan dan Anak; Satuan Tugas; Teknologi Informasi; PPA.

Abstract

Violence against women and children from an individual and social perspective can have multiple effects. The first is the psychological effect, and the second is the personal health effect and the quality of public health. Katekan, Gantiwarno, Klaten, Central Java is a rural area active in protecting women and children. The involvement of



the village government is important for the running of the prevention program because the activities of the Task Force for the Protection of Women and Children (PPA) include: outreach, identification of the conditions and services needed, protection of women and children at the scene (emergency aid), placement and displacement of women and children who experience problems and recommendations. Managing PPA activities within the village government is carried out conventionally, namely by recording it on working papers. As a form of efforts to advance information technology in the Katekan village area, there is a need for innovation from managing the PPA Task Force activities. This service's purpose is divided into two activities: 1) Making an information system and 2) Socializing the task force activity management application for handling problems of women and children for the working group in the village of Katekan Gantiwarno Klaten, Central Java. The result of community service activities is that they can contribute to science to implement the use of online applications.

Keywords: *Protection of Women and Children; The task force; Information Technology; PPA.*

1. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Banyaknya permasalahan perempuan dan anak menyebabkan Kementerian PP dan PA merasa penting untuk membentuk Satuan Tugas penanganan masalah perempuan dan anak (Satgas PPA). Keberadaan Satgas PPA untuk melakukan upaya preventif dan kuratif, mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Masalah yang terjadi adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu penanganan secara rutin dan terstruktur, biasanya dilapangan terjadi keterlambatan dalam pelaporan, tindak lanjut dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Satgas.

Beberapa referensi terkait dengan penanganan perempuan dan anak banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya:

Sistem pelaporan kekerasan perempuan dan anak terdiri dari aplikasi berbasis *mobile* dan *website* sehingga diharapkan dapat mempermudah penanganan laporan kekerasan secara cepat dan tepat hal ini diteliti oleh [1]. Hasil pengujian aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak dapat digunakan untuk melaporkan dan menampilkan tindakan serta titik lokasi kekerasan di provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh [2] mengatakan bahwa orang tua di kota Bandung sebagian besar melakukan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan anak, khususnya berkaitan dengan kekerasan yang mungkin ada di lingkungan anak. Mereka memiliki sikap positif dan empati terhadap pergaulan anak, yang ditunjukkan dengan upaya mencegah tindak kekerasan pada anak. Kesetaraan dalam keluarga juga dilakukan oleh orangtua di Kota Bandung untuk membuka ruang partisipasi anak, sehingga anak akan terbuka untuk berbagai hal.

Peneliti [3] mengatakan bahwa kendala yang dihadapi Unit PPA Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum antara lain: korban sungkan melapor, pihak keluarga



dan masyarakat yang belum paham dan cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, adanya pencabutan laporan dari pihak korban, tersangka melarikan diri, kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin.

Prosedur pendampingan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma dalam menangani anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan tahap pelaporan tindak kekerasan, *assessment*, pelaksanaan pendampingan, reintegrasi sosial dan terminasi [4],[5]. Monitoring dilakukan dengan home visit dan evaluasi dilakukan dengan rapat koordinasi penanganan kasus bersama jejaring, rapat internal tim, laporan perkembangan korban yang telah selesai didampingi. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan P2TP2A Wijaya Kusuma antara lain: dukungan dari keluarga korban, dukungan dari lingkungan korban, serta kerjasama dan koordinasi dengan jejaring P2TP2A Wijaya Kusuma. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Wijaya Kusuma antara lain: adanya judgment terhadap korban, kurangnya SDM dalam kegiatan pendampingan diteliti oleh [6],[7]. Menurut [8],[9] mengatakan bahwa penanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai hasil *assesment* dari petugas [10], selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi korban.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan solusi membangun aplikasi khusus untuk pengelolaan kegiatan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak.

2. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dua yaitu: 1) Penyampaian materi terkait aplikasi pengelolaan kegiatan penanganan masalah perempuan dan anak dan 2) Pelatihan penggunaan aplikasi pengelolaan kegiatan penanganan masalah perempuan dan anak. Materi yang diberikan terdiri dari materi tentang sosialisasi kegiatan kelompok kerja penanganan masalah perempuan dan anak, materi terkait penggunaan aplikasi pengelolaan kegiatan pokja penanganan perempuan dan anak. Kegiatan pemberian materi kepada masyarakat secara langsung dilakukan selama 4 (empat) minggu dari jam 09.00 sampai jam 16.00 WIB. Rincian materi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Penyampaian Materi

No	Materi	Jml Jam	Keterangan
1	Sosialisasi Aturan Bisnis Dan Pemodelan Sistem Informasi	07.00	Minggu ke-7: Sabtu, 19 September 2020
2	Pelatihan Instalasi dan Penggunaan Basis Data	07.00	Minggu ke-8: Sabtu, 26 September 2020
3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi dan Pembuatan Laporan Tahap 1	07.00	Minggu ke-9: Sabtu, 3 Oktober 2020
4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi dan Pembuatan Laporan Tahap 2	07.00	Minggu ke-12: Sabtu, 10 Oktober 2020
Jumlah		28.00	

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

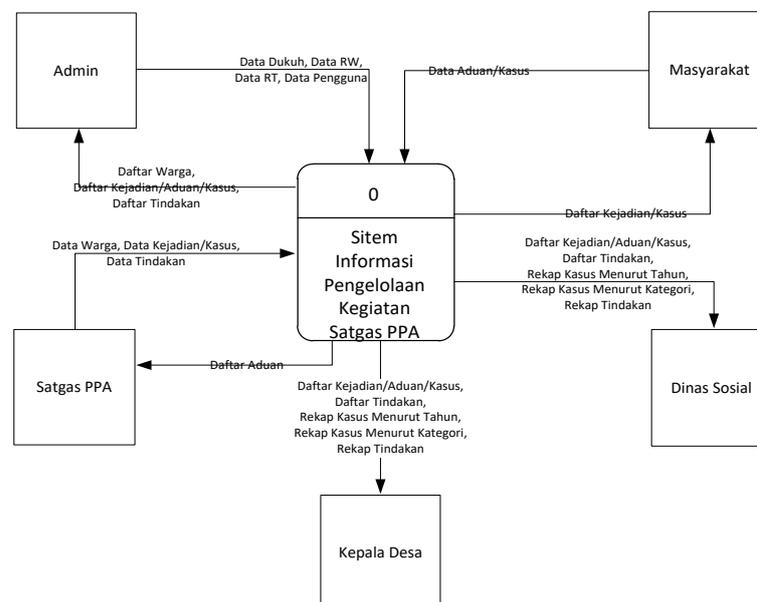
Peserta diundang oleh pemateri bekerjasama dengan Kepala Desa Katekan agar peserta menghadiri kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pada saat pelaksanaan, peserta diberi semua fasilitas yang telah disediakan. Pemateri menyampaikan bahan-bahan yang akan dicobakan/dipraktekkan sampai batas tertentu, selanjutnya peserta akan mencobakan berdasarkan materi yang telah diberikan. Setiap selesai satu sesi akan dilakukan sesi tanya jawab.

2.2 Hasil Pelaksanaan

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Katekan, Gantiwarno, Klaten cukup memuaskan. Hal ini ditandai dengan respon yang positif dari peserta terhadap materi yang disampaikan. Ada juga hasil positif yang diperoleh yaitu mereka mengusulkan adanya kerjasama yang jelas antara kampus dan pihak Desa sehingga bisa saling menguntungkan.

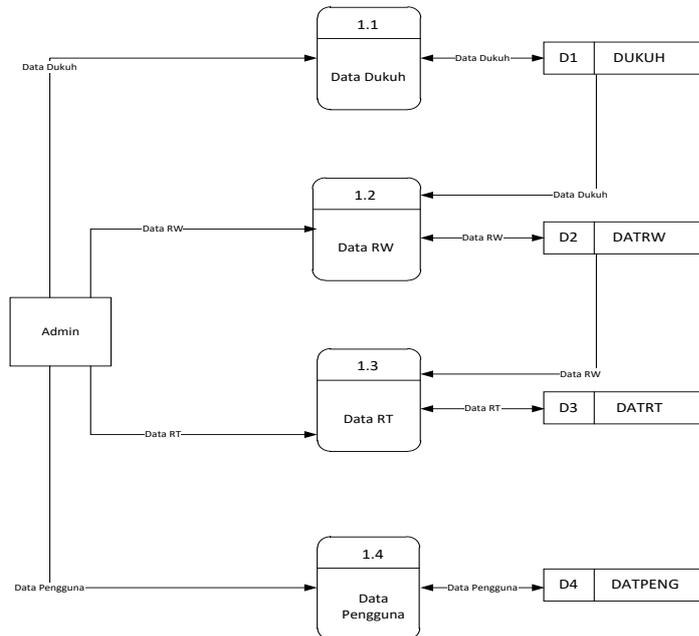
2.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem menggunakan diagram aliran data (DFD, *Data Flow Diagram*). Rancangan sistem ditampilkan pada Gambar 1 terdiri dari lima eksternal entitas yang berinteraksi dengan system yaitu Admin, Satgas PPA, Kepala Desa, Dinas Sosial dan Masyarakat.



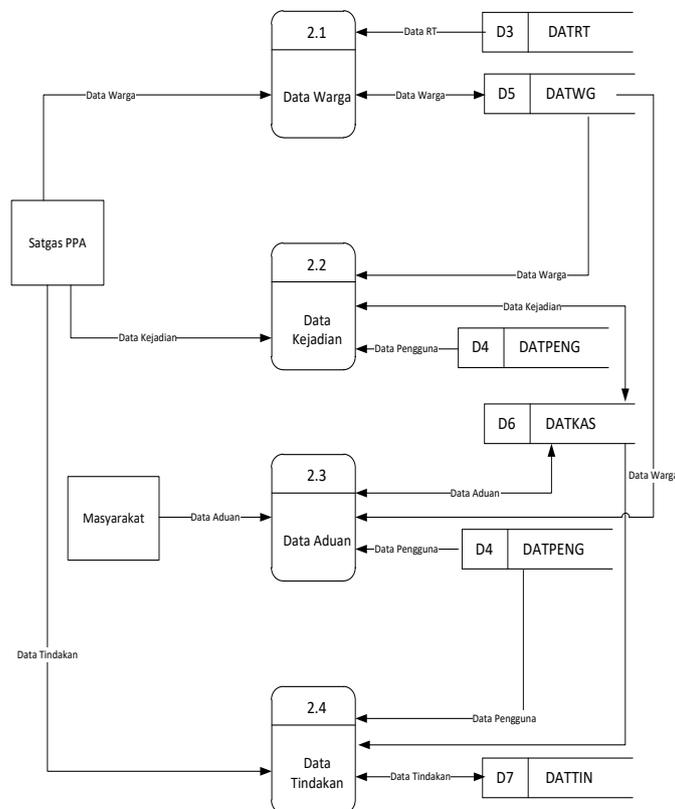
Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Pengelolaan Kegiatan Satgas

Admin, Satgas PPA dan Masyarakat bertindak sebagai sumber data maupun sebagai penerima informasi. Kepala Desa dan Dinas Sosial hanya sebagai penerima informasi saja. Gambar 2 merupakan DFD Level 1 Proses Pendataan *User* Pengelola Kegiatan yang terdiri dari 5 Proses yaitu Dukuh, RT, RW dan Pengguna.



Gambar 2. DFD Level 1 Proses Pendataan *User* Satgas PPA

Selanjutnya Gambar 3 merupakan DFD Level 1 Proses Pengelolaan Kegiatan.



Gambar 3. DFD Level 1 Proses Pengelolaan Kegiatan *User* Satgas PPA



3. PEMBAHASAN

Pemodelan sistem untuk keperluan pembuatan sistem informasi pengelolaan kegiatan satgas PPA menggunakan Diagram Arus Data (DAD). Model proses diawali dengan bentuk yang lebih umum dalam wujud diagram konteks. Berdasarkan diagram konteks, dijabarkan ke bentuk yang lebih rinci agar lebih mudah dipahami, tidak hanya prosesnya tapi juga media simpan yang dibutuhkan.

Aturan yang diberlakukan untuk sistem adalah sesuai aturan bisnis yang ada yaitu:

- a. Sistem dapat digunakan dan diakses melalui batasan-batasan sesuai *user right access* yang akan ditentukan oleh admin.
- b. Admin dapat melakukan pendataan mastering berupa data Dukuh, data RW, data RT, dan data Pengguna yang akan digunakan untuk membantu pengolahan data layanan/transaksi.
- c. Satgas PPA dapat melakukan pendataan kasus dan tindakan masalah perempuan dan anak.
- d. Masyarakat dapat mengakses sistem untuk melakukan pencatatan aduan yang terjadi di masyarakat.
- e. Pihak Dinsos dan Kepala Desa dapat mengakses informasi yang disajikan secara rinci maupun tersaring untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah 1) Perancangan sistem informasi pengelolaan kegiatan satgas PPA ini telah mewujudkan keinginan satgas untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan data dan segera untuk diimplementasikan. 2) Perancangan sistem informasi pengelolaan kegiatan satgas PPA ini dapat membantu pihak desa dan dinas sosial untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alkadri, S. P., & Insani, R. W. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPPA Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 329-337.
- [2] Rinawati, R., & Fardiah, D. (2016). Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 29-40.
- [3] Syaufi, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin. *Muwazah*, 16-28.
- [4] Derna, J. R. (2018). Pelaksanaan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wijaya Kusuma Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 629-641.
- [5] Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & AF, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 141-152.
- [6] Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal PKS*, 453-464.
- [7]



- [8] Oktafiani, R., & Yunita, F. (2018). Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Anak dan Perempuan Berbasis WEB . *Jurnal SISTEMASI*, 1-14.
- [9] Satriawan, Alfiana, Fasya, H., Amelia, A. F., & Yani, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, 37-48.
- [10] Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 112-126.
- [11] Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 27-37.